

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 8

Pengurangan Anggaran Pendidikan Dikritik

Pos Belanja Harus Seimbang

APBD Jateng Lima Tahun Terakhir

Tahun	Anggaran belanja	Pendapatan daerah	Defisit
Tahun 2015	Rp 17,09 triliun	Rp 17,09 triliun	
Tahun 2016	Rp 20,077 triliun	Rp 19,677 triliun	Rp 400 miliar
Tahun 2017	Rp 23,955 triliun	Rp 23,613 triliun	Rp 342,12 miliar
Tahun 2018	Rp 26,79 triliun	Rp 24,780 triliun	Rp 1,371 triliun
Tahun 2019	Proyeksi belanja Rp 26,459 triliun	Proyeksi pendapatan Rp 25,8 triliun	

Sumber: Pemprov Jateng (B16)

SEMARANG - Pemotongan anggaran Dinas Pendidikan Rp 150 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Jateng 2019 menuai kritik.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi mengatakan, pengurangan anggaran Rp 150 miliar untuk Dinas Pendidikan dari rencana semula itu, dikhawatirkan akan membebani orang tua siswa.

Meskipun pemotongan sudah melalui pembahasan, Ahmadi mengatakan, anggaran tersebut sangat penting karena untuk menunjang sarana-prasarana SMA/SMK.

Salah satunya, menyediakan komputer bagi siswa untuk menghadapi ujian sekolah.

Tanpa komputer, saat ujian, sekolah harus menyewa. Bisa jadi, biaya sewa akan dibebankan ke orang tua siswa.

"Hal-hal seperti ini harus dipikirkan, jangan sampai kebijakan pemerintah justru membebani," ujar Ahmadi setelah rapat paripurna dengan agenda penjelasan Raperda APBD 2019 beserta nota keuangannya di DPRD Jateng, Jumat (16/11).

Karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta Pemprov lebih fokus pada pengembangan pendidikan SMA/SMK.

Di sisi lain, dia menilai anggaran belanja pegawai naik cukup besar, yakni mencapai Rp 6,163 triliun atau naik 2,5% lebih dibanding APBD Jateng 2018.

Sementara itu, pengamat politik pemerintahan Undip M Yulianto mengingatkan agar Pemprov Jateng proporsional dalam mengalokasikan pos belanja langsung dan tak langsung. Belanja langsung jelas lebih prioritas untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Gemuk

Soal kenaikan belanja pegawai, birokrasi pemerintahan disebutnya gemuk. Karena itu, dia menyarankan langkah baiknya jika faktor-faktor penyebab belanja pegawai tinggi dievaluasi. Salah satunya adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Pemberian TPP tak masalah. Namun jika dalam pegawai tak bisa menunjukkan pelayanan maksimal dalam konteks pembangunan, TPP perlu dievaluasi," tandasnya.

Dalam dalam rapat paripurna RAPBD 2019, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mengungkapkan, proyeksi target pendapatan Rp 25,8 triliun. Sementara belanja daerah Rp 26,459 triliun yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp 18,852 triliun atau 71,25% dari total belanja daerah.

"Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan Rp 686,75 miliar dan pengelu-

aran pembiayaan Rp 30 miliar. Pembiayaan netto Rp 656,75 miliar. Jadi, Silpa nol," lanjutnya.

Menurut Gus Yasin, penyusunan alokasi anggaran berdasar pada sejumlah prioritas pembangunan Jateng, di antaranya penanggulangan kemiskinan, penguatan daya saing ekonomi daerah, pengurangan kesenjangan wilayah. (H81-41)